

THESIS
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
(Studi Kasus Dinas P3A Kabupaten Timor Tengah Selatan)



diajukan oleh:

Anggry Morangky Yoan Mambait

NIM: 21C20051

PROGRAM STUDI HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024

THESIS

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN (Studi Kasus Dinas P3A Kabupaten Timor Tengah Selatan)

Diajukan dalam Rangka Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Magister Hukum Kesehatan



Nama: Anggry Morangky Yoan Mambait

NIM : 21C20051

PROGRAM STUDI HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara fakta yuridis dan fakta sosiologis. Secara yuridis terdapat berbagai regulasi secara berjenjang mengatur tentang pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, namun fakta sosiologis menunjukkan pelaksanaan pemenuhan hak oleh Dinas P3A Kabupaten TTS-UPTD PPA hanya berupa pendampingan yang tidak terjadwal, sehingga berpotensi tidak dilaksanakan secara optimal.

Rumusan masalah penelitian yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan? 2) Bagaimana kendala pelaksanaannya?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris untuk menggambarkan pelaksanaan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, serta kendalanya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1) pelaksanaan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan meliputi pemenuhan hak penanganan perlindungan dan pemulihan, namun pelaksanaannya belum optimal pada pemenuhan hak penanganan aspek layanan kesehatan, layanan hukum, hak perlindungan aspek penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan, hak pemulihan aspek penguatan psikologis, hak pemulihan aspek pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban, hak pemulihan aspek penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman, hak pemulihan aspek penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban, hak atas informasi dalam hal pelaku telah selesai menjalani hukuman dan hak pemulihan setelah proses peradilan. 2) Kendala pelaksanaan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual meliputi lemahnya aspek struktur hukum (lemah manajemen organisasi dan personalia) berdampak pada koordinasi mitra dan komitmen kolektif yang lemah, aspek prasarana hukum (keterbatasan dana dan prasarana pendukung berupa kendaraan operasional), dan aspek kesadaran hukum (lemah pengetahuan dan pemahaman pendamping) karena belum ada pendidikan dan pelatihan khusus bersertifikasi bagi pendamping.

Kata Kunci: Dinas P3A TTS, Hak Anak, Korban, Kekerasan Seksual, UPTD PPA

ABSTRACT

This research is motivated by the gap between juridical facts and sociological facts. Juridically, there are various regulations in stages regulating the fulfillment of the rights of children who are victims of sexual violence, but sociological facts show that the implementation of rights fulfillment by the TTS-UPTD PPA Regency P3A Service only takes the form of unscheduled assistance, so it has the potential to not be implemented optimally.

The aim of this research is to determine and analyze: 1) the implementation of fulfilling the rights of children victims of sexual violence in South Central Timor Regency, 2) the obstacles faced in fulfilling the rights of children victims of sexual violence in TTS Regency.

This research uses descriptive analytical methods with an empirical juridical approach to describe the implementation of fulfilling the rights of children who are victims of sexual violence, as well as the obstacles in South Central Timor Regency. The types and sources of data used are primary data and secondary data.

The research results show that. 1) implementation of fulfilling the rights of children victims of sexual violence in South Central Timor Regency includes fulfilling the right to treatment for protection and recovery, however implementation is not yet optimal in fulfilling the right to handle aspects of health services, legal services, the right to protection aspects of providing access to implementation information, the right to recovery aspects of strengthening psychological, the right to recovery aspects of providing information about recovery services for victims, the right to recovery aspects of providing assistance with transportation, food, temporary living expenses, and adequate and safe temporary residence, the right to recovery aspects of providing educational facilities for victims, the right to information in the case of perpetrators has completed serving his sentence and has the right to recovery after the judicial process. 2) Obstacles in implementing the fulfillment of the rights of children who are victims of sexual violence include weak legal structure aspects (weak organizational and personnel management), impacting partner coordination and weak collective commitment, legal infrastructure aspects (limited funds and supporting infrastructure in the form of operational vehicles), and legal awareness aspects. (weak knowledge and understanding of companions) because there is no special certified education and training for companions.

Keywords: Children's Rights, Sexual Violence, TTS P3A Service, UPTD PPA, Victims